



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 12

Telp. (0536) 3221582 Fax. (0536) 3224185

PALANGKA RAYA 73112

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan.

Berbagai kendala dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial antara lain terbatasnya dana, sarana, prasarana dan tenaga baik kualitas maupun kuantitas, sehingga kegiatan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum dapat mengatasi dan menjangkau keseluruhan permasalahan secara optimal. Namun demikian secara umum pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan sesuai rencana.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bahan Pengukuran Kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan selama Tahun 2022.

Demikian laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan terima kasih.

Palangka Raya, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Tengah,



EDDY KARUSMAN, ST.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19770207 200312 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu perangkat daerah dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi (Palangka Raya).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai sasaran strategis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
3. Penyiapan bimbingan Teknis dan supervisi di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial.

Dari hasil evaluasi dan pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Teknis dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bidang Kesejahteraan Sosial.
2. Tingkat capaian kinerja bersumber dana APBD mencapai realisasi fisik 100%.
3. Anggaran Dinas Sosial dana APBD Tahun 2022 sebesar yaitu Rp. 57.831.019.864 (Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribuan Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
4. Pelaksanaan program telah sesuai dengan Program Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
5. Indikator Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah :
 - a. Adanya peningkatan perubahan perilaku dari masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar.
 - b. Adanya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin penerima bantuan, antara lain pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - c. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menyelenggarakan program pelayanan sosial.
 - d. Meningkatnya peran serta Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penanganan permasalahan sosial di Kalimantan Tengah.
6. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan secara detail, perlu adanya survey lebih lanjut dan memerlukan waktu serta pembiayaan yang cukup memadai, namun sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.
7. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan penguatan anggaran yang terfokus kepada Sasaran Strategis yang dimiliki Dinas Sosial yaitu Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB.I PENDAHULUAN	1
BAB.II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi Dan Misi	12
B. Tujuan dan Sasaran	16
C. Penetapan Indikator Kinerja Utama	20
D. Penetapan Kinerja 2022	21
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	46
BAB.IV PENUTUP	
A. Penutup.....	60
B. Saran.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari proses Pembangunan Nasional, Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan yang menjamin setiap warga Negara untuk dapat mencapai taraf kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidupnya serta mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan meningkatkan potensi dan sumber pelayanan sosial dasar yang tersedia serta dapat berperan aktif dalam upaya mewujudkan Kesejahteraan Sosial.

Sebagai bagian integral dari Negara kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami dan melaksanakan proses pembangunan kesejahteraan sosial. Agar proses dimaksud dapat berjalan dengan terencana, terintegrasi, terarah dan berkesinambungan maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Dinas Sosial sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut, berbagai Program dan Kegiatan baik yang bersumber dana APBD Provinsi maupun APBN secara integratif telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah secara berkesinambungan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng masa Jabatan 2021-2024, dan bukan bersifat final karena pada tahun-tahun yang akan datang program dan kegiatan dimaksud akan berkesinambungan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, disusun sebagai dokumen evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Adapun materi dan substansi yang terdapat didalamnya adalah Penetapan Kinerja Tahunan 2022, Pengukuran Pencapaian Sasaran 2022, dan Pengukuran Kinerja Kegiatan 2022.

B. KEDUDUKAN

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu perangkat daerah dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi (Palangka Raya). Dasar hukum organisasi adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
3. Penyiapan bimbingan Teknis dan supervisi di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin,

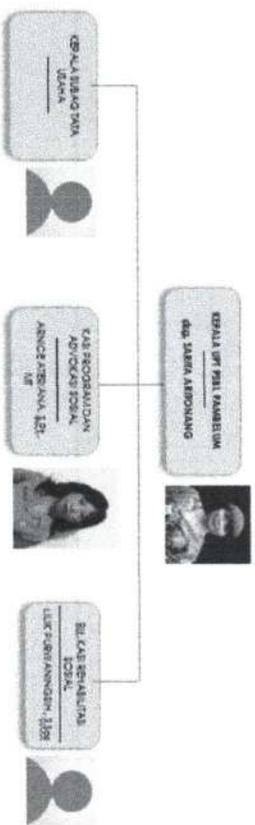
UPTD : terdiri dari 4 (empat) panti yaitu:

1. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "MAJAR TABELA"
 - a. Kepala Panti
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kasi Program dan Advokasi sosial
 - d. Kasi Rehabilitasi Sosial

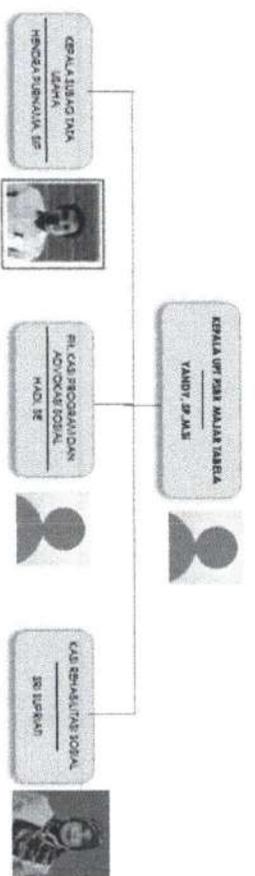
2. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "RUHUI RAHAYU"
 - a. Kepala Panti
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
3. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Sinta Rangkang"
 - a. Kepala Panti
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kasi Program dan Advokasi sosial
 - d. Kasi Rehabilitasi Sosial
4. Panti Sosial Bina Laras (PSBL) "PAMBELUM"
 - a. Kepala Panti
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kasi Program dan Advokasi sosial
 - d. Kasi Rehabilitasi Sosial

Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPT Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

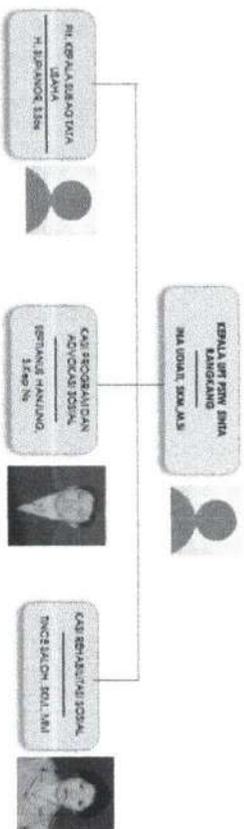
**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PSBL PAMBELUM**



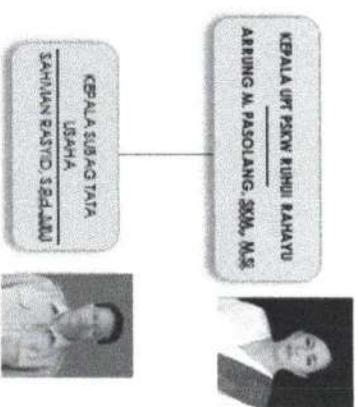
**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PSBR MAJLAR TABELA**



**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PSTW SINTA RANGKANG**



**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PSKW RUHUI RAHAYU**



D. SUMBER DAYA

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumber daya manusia dan sumber daya sosial serta sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sosial yaitu :

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 149 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 102 orang dan pegawai tidak tetap/ tenaga kontrak sebanyak 40 orang. Komposisi PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di Tabel 1.1

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Sekolah Dasar	1 orang	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1 orang	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	24 orang	
4	Diploma Satu (D-1)	-	
5	Diploma Tiga (D-3)	9 orang	
6	Diploma Empat (D-4)	7 orang	
7	Sarjana (S-1)	37 orang	
8	Sarjana (S-2)	23 orang	
	Jumlah	102 orang	

Dari jumlah PNS sebanyak 102 orang, berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	I/c Juru	0	0	0	
2	I/d Juru Muda	0	0	0	
3	II/a Pengatur Muda	0	1	1	
4	II/b Pengatur Muda Tk. I	1	1	3	
5	II/c Pengatur	0	1	1	
6	II/d Pengatur Tk. I	6	5	11	
7	III/a Penata Muda	8	6	14	
8	III/b Penata Muda Tk.I	9	14	23	
9	III/c Penata	6	8	14	
10	III/d Penata Tk. I	8	7	15	
11	IV/a Pembina	4	8	12	
12	IV/b Pembina Tk. I	3	5	8	
13	IV/c Pembina Utama Muda	0	0	0	
14	IV/d Pembina Utama Madya	0	0	0	
	IV/e Pembina Utama	0	0	0	
	Jumlah	45	57	102	

Keterangan: *)

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Seperti kita lihat di Tabel 1.3

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II	0	0	1
2	Eselon III	3	5	8
3	Eselon IV	3	6	9
4	Fungsional khusus (Pekerja Sosial)	9	19	24
	Analisis Kebijakan	1	-	1
	Dokter	1	-	1
	Perawat	1	2	3
	Psikolog Klinis	2	-	2
	Penyuluh Sosial Murni	2	2	4
	Penyuluh Sosial Penyetaraan	3	3	6
	Pekerja Sosial	3	12	15
	Pekerja Sosial Penyetaraan	2	-	2
	Pranata Komputer	1	-	1
	Instruktur Otomotif	1	-	1
	Perencana	-	1	1
5	Fungsional Umum	24	25	49
	Jumlah	47	55	102

2) Sumber Daya Sosial

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pelayanan di bidang sosial melibatkan sumber daya sosial yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, adapun sumber daya sosial yang ada antara lain :

a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat merupakan relawan sosial yang direkrut atas dasar sukarela untuk membantu masyarakat di lingkungannya yang memerlukan pelayanan sosial, adapun Jenis Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagaimana dalam Tabel 1.4

Tabel 1.4
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	Jenis TKSM	Jumlah	
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	136	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat	902	Orang
3	Taruna Siaga Bencana	698	Orang
4	Penyuluh Sosial Masyarakat	60	Orang
	Jumlah	1796	

b. Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan kesejahteraan sosial adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, adapun jenis kelembagaan kesejahteraan sosial sebagaimana Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	Nama Kelembagaan	Jumlah	
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial	130	LKS
2	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	14	Lembaga
3	Karang Taruna	570	KT
4	Kelembagaan Dunia Usaha (CSR)	3	Lembaga
5	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	38	Lembaga
	Jumlah	768	

E. LINGKUP STRATEGIS

1. Lingkungan Internal.

- a. Adanya struktur organisasi, Visi, Misi dan Strategi mampu memberikan arah yang jelas tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan dan siapa penanggungjawabnya.
- b. Sumber Daya manusia
Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja suatu organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun 2022 mempunyai Pegawai sebanyak 9 orang dengan kualitas pendidikan yang cukup baik yang terdiri dari Jabatan Struktural sebanyak 7 Jabatan dan Jabatan Fungsional sebanyak 28 orang
- c. Pedoman pelaksanaan program yang dibuat oleh penanggung jawab program/kegiatan dapat membantu para pelaksana kegiatan di lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian kegiatan sesuai waktu, mutu dan sasaran.
- d. Dukungan dana APBD.
- e. Suasana kerja cukup kondusif.

2. Lingkungan Eksternal.

- a. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan penguatan bagi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial karena dalam Undang Undang dimaksud berbagai perkembangan permasalahan sosial dan upaya pemecahannya telah disesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota akan memberikan arah yang lebih baik dan terukur bagi pelaksanaan Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di daerah.
- c. Terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 111/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial akan memberikan acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
- d. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antar Dinas Sosial dengan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dan intern Dinas Sosial diharapkan mampu mewujudkan yang lebih integratif.
- e. Dukungan infrastruktur partisipasi masyarakat seperti PSM, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), relawan sosial, tokoh masyarakat maupun lembaga masyarakat.
- f. Adanya kebijakan daerah terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana Dinas Sosial harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah maka Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan melalui pembangunan Sosial selama 2021-2024 adalah mengikuti visi dan misi Gubernur yaitu pada misi keempat yang berbunyi:

Kalimantan Tengah Makin BERKAH
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mengandung makna bahwa Dinas Sosial mengemban tugas untuk mengawal Program Pembangunan yang menjadi Visi Gubernur berdasarkan formulasi hasil analisis terhadap potensi daerah, permasalahan pokok dan isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai Visi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 khususnya pada misi ke Misi kedua (2) yaitu : “Memperkuat Ketahanan Daerah dan Mengantisipasi Perubahan Global” maka Dinas Sosial mempunyai kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan berbagai kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya visi tersebut. Visi yang disepakati oleh seluruh staf Dinas Sosial dan *stakeholders* telah mengacu pada visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, visi dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Adapun Misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Berkontribusi dalam penanganan Fakir Miskin.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Meningkatkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial di masyarakat.

Secara terperinci, penjelasan arti dan makna misi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin.

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dinas sosial sebagai bagian program dari kementerian sosial mempunyai tugas pokok dalam melakukan penanganan kemiskinan. Penanganan tersebut mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan pelayanan sosial berupa meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan peningkatan kualitas hidup;

2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun tidak semua golongan masyarakat mampu mencapai

kondisi sejahtera. Terdapat kelompok masyarakat yang memiliki beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh kondisi kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kelompok ini kemudian dikelompokkan menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Untuk membantu mereka mencapai kondisi sejahtera, diperlukan keterlibatan pihak lain yang secara terus menerus mendampingi mereka sampai mereka mempunyai kemampuan dalam mengatasi masalahnya sendiri. Dengan demikian, bantuan yang diberikan lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat stimulan. Hal ini untuk menghilangkan ketergantungan mereka terhadap pihak lain.

Berdasarkan faktor penyebab, program yang diberikan untuk menciptakan kesejahteraan bagi PPKS, disesuaikan dengan kondisi permasalahan sasaran yang kemudian dikelompokkan menjadi program yang bersifat pemberdayaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial.

Pemberdayaan ditujukan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai beberapa keterbatasan diantara kemampuan sumber daya manusia yang sangat terbatas sehingga jangkauan pelayanan masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut, maka

diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung dalam proses tersebut.

Salah satu pihak yang paling mendukung terhadap pelaksanaan pelayanan adalah masyarakat sekitar sasaran, baik secara individu maupun lembaga-lembaga sosial yang terbentuk secara sukarela dan bertujuan memberi pelayanan sosial.

4. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.

Keberadaan generasi muda dalam suatu negara, merupakan hal yang sangat strategis. Keberlangsungan suatu negara pada masa datang akan sangat bergantung kepada kemampuan mereka dalam mengelolanya. Negara akan terus berkembang dan maju, apabila generasi muda mempunyai kemampuan dan perilaku yang baik. Dan sebaliknya keberadaan negara akan bermasalah apabila generasi mudanya tidak mempunyai kepedulian yang tinggi dan tidak mampu menghormati apa yang telah diraih oleh para pendahulunya.

Globalisasi yang terjadi, sangat berpengaruh terhadap perilaku generasi muda saat ini. Banyak terjadi pergeseran yang mengarah kepada perilaku negatif. Hal-hal yang dulu dianggap tabu, kini secara perlahan telah berubah. Keberadaban yang dimiliki bangsa Indonesia, perlahan menjadi hilang di ganti dengan budaya-budaya baru yang diadopsi dari negara lain.

Kondisi-kondisi diatas, apabila tidak ditangani secara dini akan menyebabkan hilangnya jatidiri bangsa Indonesia yang sangat luhur. Kepedulian sosial akan luntur. Generasi muda tidak lagi merasa sebagai bagian dari pemegang amanah yang harus siap dan bertanggung jawab dalam keberlangsungan negaranya. Mereka menjadi generasi apatis yang tidak peduli kepada lingkungan sekitar dan bersifat individualistis yang lebih mementingkan diri sendiri di banding dengan lingkungan sekitarnya.

Untuk mencegah terjadinya kondisi tersebut, pemerintah harus memfasilitasi harapan dan meneruskan cita-cita pahlawan dalam memelihara budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satu upaya adalah mengingatkan generasi muda tentang cita-cita pahlawan melalui kegiatan yang bersifat edukasi dan membangun kekuatan kebangsaan, melibatkan dalam kegiatan sosial, dan memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan kesetiakawanan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan mampu memotivasi secara lebih efektif terhadap penghargaan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Dinas Sosial. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Sosial selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin dengan tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan kemampuan keluarga fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar
 - Meningkatkan peranan dan fungsi sosial dimasyarakat.
- b. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial PPKS melalui upaya-upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan tujuan sebagai berikut :
- Meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial PPKS
 - Meningkatkan kemampuan aksesibilitas bagi PPKS
 - Meningkatkan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PPKS
- c. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS), melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial serta pengembangan, perluasan dan penguatan jaringan kerja ;
- Meningkatkan partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - Meningkatkan upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab sosial masyarakat.
 - Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan mental dan sosial pada masa mendatang (revolusi mental).
 - Meningkatkan kesetiakawanan sosial di masyarakat (restorasi kesetiakawanan sosial).
 - Meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan kepada generasi muda.
 -

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial dalam jangka waktu tahunan serta sampai lima tahun mendatang. Dari keenam tujuan Renstra Dinas Sosial dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam Renstra periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin.
 - Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri
 - Meningkatnya peranan dan fungsi sosial dimasyarakat secara wajar;
 - Berkoortribusi dalam penurunan angka kemiskinan
2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial PPKS Masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya Kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam mengakses sumber pelayanan yang tersedia dalam upaya menumbuhkan kemandirian sosial.
 - Meningkatnya pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PPKS kategori rentan dalam pemenuhan hak dasar.
3. Meningkatkan partisipasi sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial (PSKS), melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial serta pembentukan, perluasan dan penguatan jaringan kerja. Sasarannya adalah sebagai berikut :
 - Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial;

- Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
 - Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.
4. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.
- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
 - Meningkatnya pemahaman generasi muda akan pentingnya memelihara nilai-nilai pahlawan sebagai acuan pembangunan mental generasi muda pada masa mendatang
 - Meningkatnya kesetiakawanan sosial di masyarakat melalui restorasi kesetiakawanan sosial.

C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel. 2.1 Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Orang
		Jumlah LKS dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu/SLRT	Lembaga
2.	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tidak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota asal	orang
3.	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang
		Jumlah Anak terlantar mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang
		Jumlah lanjut usia terlantar mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Orang
4.	Meningkatnya Pelindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	KPM
		Jumlah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan
5.	Meningkatnya Penanganan Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	Orang
6.	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman makam pahlawan yang ditangani	TMP

D. PENETAPAN KINERJA 2022

Pada Tahun 2022, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, melaksanakan program/kegiatan penanganan permasalahan sosial, kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.2 Indikator Kinerja dan Program Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Dana
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1 laporan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	45.021.250
		Jumlah LKS dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu/SLRT	4 Laporan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	5.539.129.604
2	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota asal	75 Orang	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota asal	162.418.850
3	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi	Jumlah Penyandang disabilitas	10 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	997.561.300

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Dana
1	2	3	4	5	6
	Kesejahteraan Sosial	terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam Panti		Terlantar di Dalam Panti	
		Jumlah Anak terlantar mendapatkan pelayanan dalam Panti	40 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti	3.414.616.650
		Jumlah Lanjut Usia terlantar mendapatkan pelayanan dalam Panti	80 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	1.038.286.163
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di luar HIV/AIDS & NAPZA di Dalam Panti	20 Orang	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di luar HIV/AIDS & NAPZA di Dalam Panti	456.899.850
4	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 KPM	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas daerah Kabupaten/Kota	19.574.163.673
		Jumlah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3.535.852.600
5	Meningkatnya Penanganan Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	200 Orang	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.340.479.950
6	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan	1 Laporan	Rehabilitasi Sarana & Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

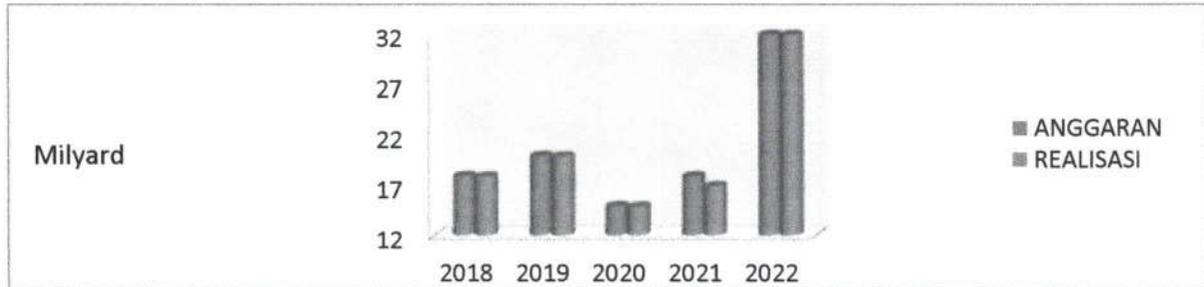
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan perencanaan yang dipersamakan dengan perencanaan strategis, telah ditetapkan 6 sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2022. Untuk mencapai 6 sasaran strategis yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui 7 Program 19 kegiatan dan 80 Sub Kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mendapat anggaran belanja dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 57.831.019.864 (Lima Puluh Tujuh Miliar Delapan ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan capaian realisasi sebesar Rp. 54.697.001.601 (Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Seribu Enam Ratus Satu Rupiah) dengan realisasi fisik sebesar (100 %).

Terjadi fluktuasi anggaran bersumber dana APBD. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan maupun penurunan anggaran sebagaimana sebagai tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Perkembangan Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Bersumber Dana APBD
Periode Tahun 2018 – 2022.



Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi perubahan anggaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, hal ini sesuai dengan perubahan sasaran kegiatan ada setiap tahun berjalan. Tidak ada penurunan drastis terjadi pada tahun 2022.

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera di atas.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022 dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah, mengalami kenaikan walaupun masih adanya pandemi covid-19. Hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja program yang mencapai realisasi fisik 100% khususnya dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun berjalan.

Beberapa kendala yang terjadi dalam pencapaian target, adalah terdapat penyesuaian anggaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara ini tahapan dalam melakukan anggaran perubahan, memerlukan waktu yang cukup untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Apabila dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat beberapa sasaran yang mengalami perubahan jumlah sasaran khususnya berkaitan dengan terjadinya penambahan anggaran Tahun 2022. Capaian kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 secara keseluruhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja

APBD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		Tahun 2022			Ket
			2020	2021	Target	Realisasi	(%)Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pemberdayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peningkatan Kemampuan Sumber Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	
		Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	136 Orang	136 Orang	136 Orang	136 Orang	100%	
		Jumlah Peningkatan Kapisitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	7 SLRT	7 SLRT	7 SLRT	7 SLRT	100%	
2	Meningkatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota asal	75 Org	75 Org	75 Org	75 Org	100%	Tetap
3	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	15 Org	15 Org	20 Org	20 Org	100%	Naik

		Jumlah Anak terlantar mendapatkan pelayanan dalam panti	50 Org	100 Org	80 Org	80 Org	100%	Turun
		Jumlah lanjut usia terlantar mendapatkan pelayanan dalam panti	80 Org	80 Org	65 Org	65 Org	100%	Turun
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS & NAPZA terlantar mendapatkan pelayanan dalam panti	40 Org	40 Org	20 Org	20 Org	100%	Turun
4	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	275 Org	300 Org	150 Org	150 Org	100%	Turun
		Jumlah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Tetap
5	Meningkatnya Penanganan bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	717 Org	717 Org	200 Org	200 Org	100%	Turun
6	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	Tetap

B. Analisis Capaian Kinerja

Dalam mengukur kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan Tahun 2022 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu *inputs*, *outputs* dan *outcomes*. Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya *benefits* maupun *impacts* beberapa kegiatan pada Tahun 2022, selain itu dampak pandemi covid-19 juga mempengaruhi hasil capaian kinerja.

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2022 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

1. Pengukuran Kinerja

a) Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

$70 \leq X < 85$: Berhasil

$55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil

$X < 55$: Tidak Berhasil

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan "**Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok**". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (Nilai Tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%), dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu Rata-rata dari Hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, atau dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori X Mean Kategorinya}) \times 100\%}{\text{Jumlah Indikator}}$$

b) Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (*outcomes*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran dalam tataran output (keluaran) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah:

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja

No	Sasaran	Skala Pengukuran Ordinal			
		Sangat Berhasil (85 s.d. 100)	Berhasil ($\leq 70X < 85$)	Cukup Berhasil ($55 \leq X < 70$)	Tidak Berhasil ($X < 55$)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	100			
2	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100			
3.	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100			
4.	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	100			
5.	Meningkatnya Penanganan Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana	100			
6.	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100			

Dari 6 (enam) sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

•	Sangat Berhasil	6	100 %
•	Berhasil	-	-
•	Cukup Berhasil	-	-
•	Tidak Berhasil	-	-
	Jumlah	6	100%

C) Uraian Capaian Kinerja

1. Meningkatnya Pemberdayaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja.

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Tahun 2022			Keterangan
				Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pemberdayaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peningkatan Kemampuan Sumber Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
		Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	136 Orang	136 Orang	136 Orang	136 Orang	100%
		Jumlah LKS dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %

Kelembagaan sosial masyarakat merupakan komponen penting dalam keberhasilan pelayanan sosial di masyarakat karena kelembagaan merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan kesadaran melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Dengan dasar ini, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan fasilitasi dan menyediakan saluran agar kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dapat berjalan dengan baik dan sinergis dengan program-program yang dilaksanakan pemerintah.

Pada Tahun 2022 pemberdayaan kelembagaan sosial dilaksanakan secara menyeluruh baik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personalnya maupun kepada organisasi yang mewadahnya. Hal ini dianggap akan lebih efektif karena sehingga keberadaan kelembagaan sosial di masyarakat akan lebih dirasakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

1.2 Realisasi Outcomes

Dalam penanganan permasalahan sosial, selain bekerja sama dengan aparat pemerintah, Dinas Sosial juga mempunyai mitra kerja di masyarakat yang tergabung dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Peran mereka sangat penting dalam tercapainya keberhasilan program karena stakeholder ini mempunyai keterkaitan yang erat dalam sistem lingkungan penyandang masalah, baik secara fisik maupun emosional. Potensi dan sumber tersebut adalah Organisasi Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kepedulian Sosial Dunia Usaha (CSR). Program yang diprioritaskan bagi mereka adalah pengembangan kapasitas sehingga secara profesional mereka dapat melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial secara langsung kepada masyarakat.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari program-program yang dilaksanakan pada sasaran ini diantaranya adalah :

- Partisipasi masyarakat secara umum yang meningkat dalam pelayanan-pelayanan sosial ditandai dengan keterlibatan dalam program yang dilaksanakan baik secara individu maupun masyarakat sebagai komunitas.

- Kegiatan pembentukan forum CSR telah memberikan informasi yang jelas bagi perusahaan tentang kewajiban perusahaan dalam keterlibatan mereka dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan.
- Meningkatnya partisipasi lembaga-lembaga sosial swasta (LKS) dengan memperbaiki pelayanan yang dilaksanakan sebagai hasil dari penguatan kapasitas.
- Jumlah Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Yang sudah terbentuk di 7 Kabupaten merupakan indikator kinerja yang baru menyesuaikan dengan sasaran yang ada pada Kementerian sosial dimana tugas SLRT untuk mengoptimalkan Layanan Satu Pintu yang didirikan untuk membantu masyarakat khususnya prasejahtera. Tujuannya adalah menghubungkan dan memudahkan mereka dalam mengakses berbagai layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola pemerintah sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 1.1 Pemberdayaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial

2. Meningkatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan dapat dilihat pada tabel 3.5 realisasi capaian kinerja dibawah ini :

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Tahun 2022			Keterangan
				Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	5	6	7	8	9
2.	Meningkatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban tidak Kekerasan dari titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ kota	75 Org	75 Org	75 Org	100 %	terpenuhi

Dalam sasaran ini kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah pemulangan orang terlantar ke provinsi terdekat. Sementara kegiatan lain adalah pendampingan terhadap kegiatan penyaluran bantuan bencana bersumber dana APBN sehingga program bersifat sinergis dan saling melengkapi.

2.1 Realisasi Outcomes

Program ini dilaksanakan dalam sasaran ini diantaranya adalah memfasilitasi pemulang warga migran terlantar ke provinsi terdekat dalam upaya melindungi Warga negara tindak kekerasan dalam hal ini pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/ kota.



Gambar 2.1 Penanganan Warga Migran Terlantar

3. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dapat dilihat pada tabel 3.6 realisasi capaian kinerja dibawah ini :

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Keterangan	
			2022	Target	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	10 org	10 org	10 org	100 %	terpenuhi
		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Pelayanan dalam panti	40 org	40 org	40 org	100%	Terpenuhi
		Jumlah Lanjut Usia terlantar mendapatkan pelayanan dalam panti	80 Org	80 Org	80 Org	100%	Terpenuhi
		Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS & NAPZA terlantar mendapatkan pelayanan dalam Panti	20 Org	20 Org	20 Org	100%	Terpenuhi

Program rehabilitasi sosial disabilitas terlantar di dalam panti. Secara alur kerja sasaran program ini merupakan eks penghuni rumah sakit jiwa yang dikuatkan keberfungsian sosial melalui pembinaan dalam panti. Untuk tahap awal jumlah yang mampu ditangani sebanyak 10 orang dan ditangani pada Panti Sosial Bina Laras Pabelum. Sesuai dengan rencana yang dimiliki oleh Dinas Sosial maka jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan pengembangan yang terintegrasi antara fisik dan pengelolaan pelayanan termasuk penguatan dalam bidang sumber daya manusia.

Dalam program pembinaan anak terlantar di dalam panti dimana jumlah Anak terlantar yang mengikuti pengembangan bakat dan keterampilan yang mengikuti hanya 40 orang dari target rencana yang sebelumnya sebanyak 40 orang maka dari itu realisasi hanya mencapai sekitar 100% capaian kinerja. Beberapa hal yang menjadi kendala untuk menambah target pada indikator tersebut adalah anggaran yang diberikan kurang alokasi dana. secara berkala seyogianya pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana dampingan untuk kegiatan ini, mengingat keberlanjutan program menjadi kewenangan kabupaten/kota termasuk pemberian bantuan stimulan pasca diberikan pelatihan oleh Dinas Sosial Provinsi.

Program Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werda "Sinta Rangkang" Palangka Raya sebanyak 80 orang berupa pemberian jaminan hidup bagi penghuni panti jompo selama satu tahun. Program ini bersifat tetap dengan jumlah target yang bisa berubah kapan saja tergantung dari banyaknya klien yang ada panti Sosial tresna werdha sinta rangkang untuk setiap tahun anggaran selama 5 tahun sesuai dengan dokumen perencanaan menengah. Dalam tabel diatas, dapat diinformasikan bahwa kegiatan pelayanan pada panti jompo, tidak mengalami penambahan dan mengalami penurunan dari banyaknya penghuni panti dari yang awalnya penghuni panti 80 orang tepat 80 orang penghuni panti.

Program Rehabilitas Sosial bagi Penyandang bagi Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza di dalam panti dilaksanakan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) jumlah siswa sebanyak 40 (empat puluh) orang dibagi menjadi 2 angkatan bertambah dibandingkan

pada tahun 2021 dimana hanya berjumlah sekitar 20 orang dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan ada anjuran pemerintah untuk tidak membuat kerumunan dalam bentuk apapun maka untuk sementara hanya ada satu angkatan dan di karenakan tidak boleh adanya kegiatan yang bersifat kerumunan atau perkumpulan maka kegiatan tersebut ditiadakan.

3.2 Realisasi Outcomes

Sasaran ini merupakan kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memerlukan rehabilitasi sosial dalam rangka pemulihan kembali orang atau penyandang masalah kesejahteraan sosial agar bisa teratasi masalahnya yang meliputi; pemulihan kembali kepercayaan diri, mandiri serta tanggung jawab pada diri, keluarga, masyarakat ataupun lingkungan sosialnya.

Dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

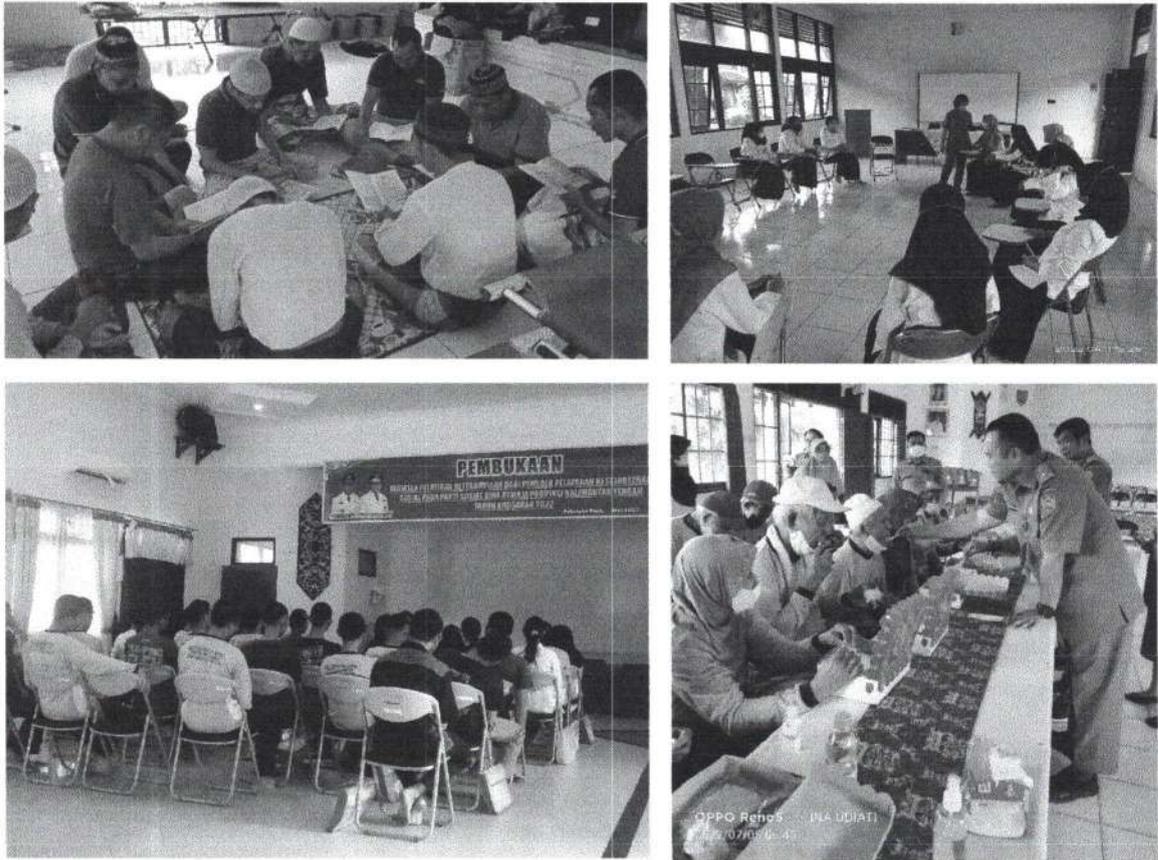
- Bimbingan sosial dan keterampilan pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR),
- Bimbingan sosial dan keterampilan pada Panti Sosial Karya Wanita (PSKW),
- Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Lanjut Usia pada Panti Sosial Sosial Tresna Werda "Sinta Rangkang" (PSTW)
- Pelayanan sosial bagi penderita eks psikotik (gangguan jiwa) pada Panti Sosial Bina Laras Pabelum (PSBL).

Secara umum, kegiatan dalam kelompok sasaran ini, selain memberikan penanganan rehabilitasi kepada klien, juga diciptakan hal-hal yang bersifat preventif seperti sosialisasi bagi remaja tentang penyalahgunaan Napza, atau sosialisasi bahaya HIV/AIDs di lokalisasi. Sementara untuk menciptakan keberfungsian sosial kelayan, dilaksanakan kegiatan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan lingkungan mereka diantaranya bimbingan dan pelatihan keterampilan yang ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan stimulan.

Program-program yang dilaksanakan dalam menangani sasaran ini adalah meningkatkan keberfungsian sosial PPKS dalam kategori pemulihan baik secara mental, sosial dan ekonomi sehingga bantuan sosial diberikan

Sementara bagi Penyandang Masalah yang dianggap masih mampu melakukan mobilitas fisik secara mandiri, bantuan yang diberikan berupa

stimulan usaha ekonomis produktif yang bertujuan menguatkan mereka dalam sisi ekonomi sehingga bisa lebih mandiri dan tidak membebani keluarganya.



Gambar 3.1 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Di dalam Panti

4. Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial, dapat dilihat pada tabel 3.7 realisasi capaian kinerja dibawah ini :

Tabel 3.7 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Tahun 2022	(%) capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	150 orang	150 org	100 %	terpenuhi
		Jumlah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100 %	terpenuhi

Sementara kegiatan ini adalah pendampingan terhadap kegiatan penyaluran bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat bersumber dana APBD sehingga program bersifat sinergis dan saling melengkapi.

4.2 Realisasi *Outcomes* (Manfaat)

Manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan kontribusi terhadap program – program Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di Kaimantan Tengah seperti pelaksanaan program Bantuan BLT. Program ini mensyaratkan adanya kontribusi dari pihak Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, karena terdapat beberapa keterbatasan program yang dikaitkan dengan geografis wilayah diantaranya lokasi sasaran yang cukup jauh sehingga anggaran yang tersedia kurang mencukupi. Selain itu potensi SDM pelaksana juga harus tetap ditingkatkan melalui pendampingan-pendampingan yang terencana.



Gambar 4.1 Penyaluran Bantuan

5. Meningkatnya Penanganan bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana, dapat dilihat pada Tabel 3.8 Realisasi Capaian Kinerja.

Tabel 3.8 Realisasi Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Tahun 2021			Ket.
			2021	Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	5	6	7	8	9
5.	Meningkatnya Penanganan Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	200 org	200 Org	200 Org	100 %	terpenuhi

Sementara kegiatan lain adalah pendampingan terhadap kegiatan penyaluran bantuan bencana bersumber dana APBN sehingga program bersifat sinergis dan saling melengkapi.

5.2 Outcomes (Manfaat)

Manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan kontribusi terhadap program – program nasional yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah seperti pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penanganan Stunting. Program ini mensyaratkan adanya kontribusi dari pihak Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, karena terdapat beberapa keterbatasan pelaksanaan program yang dikaitkan dengan geografis wilayah diantaranya lokasi sasaran yang cukup jauh sehingga anggaran yang tersedia kurang mencukupi. Selain itu potensi SDM pelaksana juga harus tetap ditingkatkan melalui pendampingan-pendampingan yang



Gambar 5.1 Penyaluran Bantuan

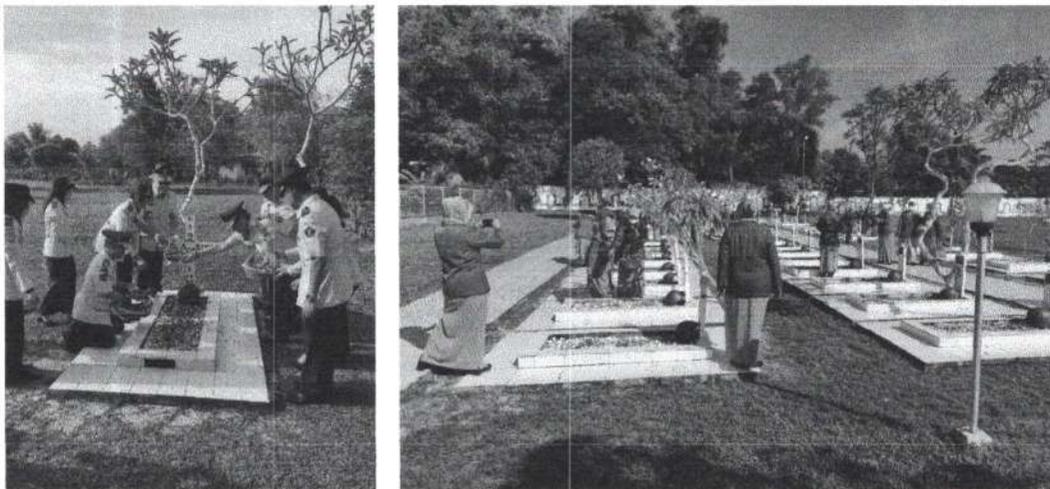
6. Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dapat dilihat pada Tabel 3.9 Realisasi capaian Kinerja

Tabel 3.9 Realisasi Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Tahun 2021			Ket.
			2021	Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	5	6	7	8	9
6.	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Tanam Makam Pahlawan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	tetap

Bila dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat perubahan kinerja pada Tahun 2022 seperti pada jumlah masyarakat yang menanam nilai- nilai Kkepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan dan kesetiawakawan sosial

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian penghormatan kepada jasa pahlawan yang sudah membela bangsa dan negara, serta rela mengorbankan jiwa raga dalam melaksanakan tugas negara



Gambar 6.1 Masyarakat yang menanam nilai- nilai Kepahlawanan

C. ASPEK KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mendapat Pagu anggaran belanja langsung dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 57.831.019.864 (Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 54.697.001.601 (Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seribu Enam Ratus Satu Rupiah) dengan realisasi fisik sebesar (100%)

Secara terperinci, penggunaan dana untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Program Pemberdayaan Sosial	5.817.604.854	5.702.394.100	98,41
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tidak Kekerasan	162.418.850	79.773.500	49,12
3.	Program Rehabilitasi Sosial	5.947.338.963	5.777.015.104	97,14
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	23.420.935.350	23.332.377.973	99,62
5.	Program Penanganan Bencana	1.340.479.950	1.208.765.533	90,17
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	180.000.000	178.933.000	99,41

D. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada Tahun Anggaran 2022 masih terdapat permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

1. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum sepenuhnya akurat *By Name By Address* (BNBA), sehingga ketepatan sasaran belum maksimal.
2. Kebijakan perubahan anggaran yang dilakukan pada Triwulan 4 dimana sebagian anggaran di alihkan ke penanganan Implasi yang menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan tidak mempunyai cukup waktu sehingga serapan kinerja maupun keuangan menjadi tidak maksimal.
3. Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Tengah sehingga terdapat beberapa kegiatan yang jumlah dananya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.
4. Mutasi jabatan yang cukup singkat di di Provinsi maupun Kabupaten/Kota menyebabkan kesinambungan program menjadi terganggu karena pengalihan jabatan tidak diimbangi dengan pelimpahan tugas dan pekerjaan.
5. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi dalam melakukan kegiatan di Kabupaten/Kota memerlukan proses koordinasi dalam waktu yang cukup lama, sehingga pelaksanaan kegiatan terpuncak pada akhir Tahun Anggaran.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota belum memahami mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial belum optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dilaksanakan adalah :

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan sehingga target sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan kriteria PPKS yang telah ditentukan dan menghindari terjadinya salah sasaran program.

2. Mendorong Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah agar terus mengupayakan kenaikan APBD bagi pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota masing-masing.
3. Mengusulkan dana sharing dalam program APBD untuk memaksimalkan program/kegiatan, sehingga hasil kegiatan menjadi lebih maksimal.
4. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada Tahun 2022 sehingga permasalahan yang sama dapat diantisipasi pada masa mendatang.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat realisasi anggaran tahun 2022 yang telah dicapai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan			Ket.
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial			5.774.394.604		5.682.860.100	98,41	
1.06.02.1.02 Pemberdayaan sosial Potensi Sumber Sosial Provinsi			5.774.394.604		5.682.860.100	98,41	
1	1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	45.021.900	1 Laporan	38.379.900	85,25	
2	1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	190.243.100	136 Orang	148.637.000	78,13	
3	1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	5.539.129.604	4 Laporan	5.495.843.200	99,22	

1.06.03 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			162.418.850		79.773.500	49,12	
1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			162.418.850		79.773.500	49,12	
3.	1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	162.418.850	75 Orang	79.773.500	49,12	
1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial			5.947.338.963		5.777.015.104	97,14	
4	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	997.561.300	10 Orang	968.385.780	97,08	
5	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	3.414.616.650	40 Orang	3.368.532.421	98,65	
6	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam Panti	1.038.286.163	80 Orang	988.718.123	95,23	
7	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS & NAPZA di Dalam Panti	456.899.850	20 Orang	432.786.780	94,72	
1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			455.884.600		438.324.750	99,62	
8	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	23.420.935.350		23.332.377.973	99,62	
	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan	310.919.250		309.531.300	99,55	

		Sosial Kesejahteraan Keluarga					
9	1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	19.574.163.500	150 KPM	19.571.576.673	100	
10	1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3.535.852.600	1 Laporan	3.535.852.600	100	
1.06.06 Program Penanganan Bencana			1.340.479.950		1.208.765.533	90,17	
11	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.340.479.950	200 Orang	1.208.765.533	90,17	
	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	199.995.200	200 Orang	102.353.350	51,18	
12	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan sosial	1.140.484.750	200 Orang	1.106.412.18.	97,01	
1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			180.000.000		178.933.000	99,41	
13	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	180.000.000	1 Unit	178.933.000	99,41	
14	1.06.07.1.01.01	Rehabilitasi Sarana & Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100.000.000	1 Unit	98.933.000	98,93	
	1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Sarana & Prasaranan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	80.000.000	1 Unit	80.000.000	100	

BAB IV P E N U T U P

A. PENUTUP

Secara umum, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah telah mampu melaksanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsinya. Beberapa kendala yang terjadi dapat diatasi dengan baik sehingga realisasi keuangan dan realisasi kegiatan cukup baik.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2022 adalah penyempurnaan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang belum sempurna. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan yang mengganggu kinerja program. Kedepan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat ditingkatkan dengan berkaca pada Laporan Kinerja ini.

B. SARAN

Memperhatikan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, sebagaimana yang telah tercermin pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, terdapat beberapa hal yang memerlukan peningkatan yaitu :

1. Diperlukan penambahan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas seperti penanggulangan kemiskinan. Bila dicermati kondisi saat ini, antara besaran dana Daerah masih relatif perlu penambahan, Sehingga hal ini berpengaruh terhadap keberlanjutan program/kegiatan pada jangka panjang.
2. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat sinergitas program. Dengan demikian kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kesatuan perencanaan yang terpadu dan saling mendukung. Program-program yang diluncurkan pusat dapat diteruskan secara tepat sasaran oleh pemerintah daerah dan memberikan hasil yang maksimal untuk masyarakat Kalimantan Tengah.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Palangka Raya, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Tengah,



EDDY KARUSMAN, ST.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19770207 200312 1 004

Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum

RPJMD

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatkan Pemberdayaan terhadap Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatkan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
4. Meningkatkan Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
5. Meningkatkan Pemberdayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial
6. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana.

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

1. Persentase Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ditangani
2. Persentase Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan

ESELON II

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sasaran strategis :

Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana

Indikator Kinerja Utama

1. Jumlah PPKS
1. Jumlah lokasi pengendalian program PKH
2. Jumlah instansi/lembaga yang berpartisipasi
3. Jumlah pembinaan KSB

Bidang Rehabilitasi Sosial

Sasaran strategis :

1. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Pembinaan Bagi Anak Terlantar
3. Meningkatkan pembinaan para penyandang cacat dan trauma
4. Meningkatkan Pembinaan Terhadap Eks Penyandang Penyakit Sosial

Indikator Kinerja Utama :

1. Jumlah PMKS yang mengikuti KIE konseling dan kampanye social
2. Jumlah Anak terlantar, Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi
3. Jumlah Lanjut Usia dalam keluarga
4. Jumlah Penyandang Eks Psikotik di dalam Panti
5. Jumlah penyandang cacat dan trauma
6. Jumlah eks penyandang penyakit sosial
7. Jumlah korban tindak kekerasan di Trauma Center

Bidang Pemberdayaan Sosial

Sasaran strategis :

Meningkatnya Pemberdayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja Utama :

1. Jumlah Lokasi pemetaan / peninjauan awal KAT
2. Jumlah TKSK
3. Jumlah LKS
4. Jumlah Karang Taruna
5. Jumlah masyarakat yang menaman nilai-nilai kepehlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Sasaran strategis :

Meningkatnya Pemberdayaan terhadap Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja Utama :

1. Jumlah Keluarga Miskin
2. Jumlah Pendamping sosial

ESELON III

KEGIATAN :

1. Menyiapkan bahan logistik untuk korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
2. Fasilitasi pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pelopor Perdamatan, pendamping Kabupaten yang berpotensi dalam melaksanakan PKH dan Kampung Siaga Bencana (KSB)
3. Mendistribusikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk peserta PKH
4. Fasilitasi pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya
5. Melaksanakan verifikasi, validasi terhadap korban Bencana Sosial
6. Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan bantuan logistik
7. Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA), pelopor perdamatan, dan Taruna Siaga Muda yang terampil, Petugas Pendamping Kabupaten yang berpotensi melaksanakan PKH
8. Jumlah peserta PKH yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
9. Jumlah orang terlantar yang tertangani
10. Jumlah Korban Bencana Sosial yang mendapatkan bantuan sosial

KEGIATAN :

1. Memfasilitasi pendistribusian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas berat
2. Memfasilitasi pengiriman pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas
3. Memfasilitasi pengiriman pendidikan dan pelatihan bagi wanita rawan sosial ekonomi
4. Memfasilitasi penanganan tuna sosial
5. Jumlah Penyandang disabilitas berat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
6. Jumlah Penyandang disabilitas yang terfasilitasi ekonomi wanita rawan sosial
7. Jumlah wanita terfasilitasi ekonomi tuna sosial yang tertangani
8. Memfasilitasi peserta pelatihan bagi anak terlantar
9. Memfasilitasi bantuan pemenuhan kebutuhan pangan Lanjut Usia Terlantar yang mendapat bantuan
10. Jumlah anak terlantar yang tertangani
11. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

KEGIATAN :

1. Fasilitasi pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2. Fasilitasi pembinaan pemahaman pelestarian nilai-nilai keparahawanan dan kesetiakawanan sosial
3. Pelestarian nilai-nilai keparahawanan
4. Memfasilitasi pemberian bantuan bahan kebutuhan dasar bagi KK warga KAT
5. Jumlah TKS, PSM, Petugas Organisasi, Karang Taruna, dan Penyuluh Sosial yang terampil
6. Jumlah peserta kegiatan pelatihan tentang pelestarian nilai-nilai keparahawanan dan kesetiakawanan sosial yang bersertifikat
7. Jumlah makan pahlawanan dan monumen dalam keadaan baik
8. Jumlah KK Warga KAT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

KEGIATAN :

1. Melaksanakan Bimbingan teknis ekonomi produktif (JEP) KUBE untuk keluarga miskin Perdesaan, Perkotaan, dan Pulau-pulau kecil
2. Melaksanakan supervisi kegiatan identifikasi Fakir Miskin ekonomi produktif (JEP) KUBE untuk keluarga miskin Perdesaan, Perkotaan, dan Pulau-pulau kecil
3. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
4. Melaksanakan Monitoring terhadap bantuan Stimulan
5. Memberikan pendampingan dan bantuan stimulan terhadap masyarakat Miskin/orang tidak mampu dalam Basis Data Terpadu (BDT)
6. Melaksanakan supervisi kegiatan identifikasi Fakir Miskin yang masuk dalam BDT melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap Pelaksanaan Tugas/kegiatan
7. Melaksanakan Monitoring terhadap Basis Data Terpadu (BDT)
8. Jumlah UEP KUBE Perdesaan, Perkotaan, dan Pulau-pulau kecil
9. Terlaksanannya pengawasan kegiatan identifikasi Fakir Miskin dan ekonomi produktif (JEP) KUBE untuk keluarga miskin Perdesaan, Perkotaan, dan Pulau-pulau Kecil
10. Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
11. Terlaksananya kegiatan bantuan Stimulan KUBE Perkotaan, Perdesaan dan Pesisir dan pulau-pulau kecil
12. Jumlah Fakir Miskin/orang tidak mampu yang mendapatkan bantuan stimulan dalam Basis Data Terpadu (BDT)
13. Terlaksananya pengawasan Identifikasi Fakir Miskin yang Masuk Dalam Basis Data Terpadu (BDT)
14. Jumlah Basis Data Terpadu (BDT) yang sudah di Verifikasi
15. Terlaksananya kegiatan hasil kegiatan Verifikasi terhadap Basis Data Terpadu (BDT)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS SOSIAL

Jln. Mayjen D.I. Panjaitan Nomor 12 Telp (0536) 3221582 Fax 3224185
Palangka Raya 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. NOOR HALIM, S.Pd., M.Pd**
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama:
Plt. KEPALA DINAS,

H. SUGIANTO SABRAN

Dr. NOOR HALIM, S.Pd., M.Pd
NIP. 19690702 199512 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS SOSIAL

Jln. Mayjen D.I. Panjaitan Nomor 12 Telp (0536) 3221582 Fax 3224185
Palangka Raya 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. NOOR HALIM, S.Pd.,M.Pd**
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH.

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Apabila target kinerja tidak tercapai maka kami bersedia menerima sanksi dari pimpinan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama:
Plt. KEPALA DINAS,

H. SUGIANTO SABRAN

Dr. NOOR HALIM, S.Pd., M.Pd
NIP. 19690702 199512 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS SOSIAL

Jln. Mayjen D.I. Panjaitan Nomor 12 Telp (0536) 3221582 Fax 3224185
Palangka Raya 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kegiatan	1
		Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	orang	136
		Jumlah LKS dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu/SLRT	Laporan	4
2.	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota asal	orang	75
3.	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang	10
		Jumlah Anak terlantar mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang	40
		Jumlah lanjut usia terlantar mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang	80
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang	20

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4.	Meningkatnya Pelindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	KPM	150
		Jumlah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan	1
5.	Meningkatnya Penanganan Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	Orang	100
6.	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman makam pahlawan yang ditangani	Unit	1

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 812.784.854	
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 183.787.850	
3.	Program Program Rehabilitasi Sosial	Rp 6.010.808.970	
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 1.062.602.350	
5.	Program Penanganan Bencana	Rp 1.330.737.950	
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 173.700.000	

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama:
Plt. KEPALA DINAS,



II. SUGIANTO SABRAN

Dr. NOOR HALIM, S.Pd., M.Pd
NIP. 19690702 199512 1 003